

Kemitraan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata *Mangrove* di Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti

Ricky Syuldairi¹, Rury Febrina²

^{1,2}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau, Indonesia

¹rickysyuldairi@gmail.com

Abstract

Abstract: The purpose of this study was to find out and understand how community empowerment-based partnerships in the development of mangrove tourism in Bokor Village, Rangsang Barat District, Meranti Islands Regency. The method used is a qualitative method, namely the collection of data in a natural setting using natural methods and carried out by people or researchers who are naturally interested, namely the Head of the Bokor Village and the Head of the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) Bathin Galang, Bokor Village, through interviews, observations and documentation. The government of Bokor Village and Pokdarwis Bathin Galang, Bokor Village are developing innovations that are important for economic welfare and community welfare by creating mangrove tourist destinations. The partnership that exists in increasing the development of mangrove tourism in Bokor Village has a problem, namely the partnership is not sustainable. This is because the Bokor Village Government and Pokdarwis Bathin Galang, Bokor Village are still in the exploration stage or are still in the negotiation stage with stakeholders / private parties in the Meranti Islands Regency to contribute in increasing the development of mangrove tourism in Bokor Village.

Keywords: Partnership, Community Empowerment, Mangrove Tourism Development.

Abstrak

Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kemitraan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata *mangrove* di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah, yakni Kepala Desa Bokor dan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bathin Galang Desa Bokor, melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor mengembangkan inovasi yang penting bagi kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan membuat destinasi wisata *mangrove*. Kemitraan yang terjalin dalam meningkatkan pengembangan wisata *mangrove* di Desa Bokor mengalami masalah, yaitu kemitraannya tidak berkelanjutan. Hal ini dikarenakan, Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor masih dalam tahap menjajaki atau masih dalam tahap perundingan kepada *stakeholders*/pihak swasta di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk berkontribusi dalam meningkatkan pengembangan wisata *mangrove* Desa Bokor.

Kata kunci: Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Wisata *Mangrove*.

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai hutan *mangrove* yang terluas dengan memiliki keragaman hayati yang terbesar dan strukturnya paling bervariasi. Di Indonesia perkiraan luas *mangrove* juga sangat beragam yaitu sekitar 4,25 juta hektar atau 3,98% dari seluruh luas hutan di Indonesia (Erbabley & Furqon, 2019). Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang sangat beragam dan produktif, serta dapat juga mempengaruhi kehidupan ekonomi yang luar biasa terhadap manusia.

Pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan merupakan kebijakan penting pemerintah, kebijakan tersebut didasarkan karena wilayah pesisir dan laut dalam faktor ekologis dan ekonomis sangat potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat. Hutan *mangrove* merupakan vegetasi pantai tropis dan subtropis yang didominasi

oleh beberapa jenis *mangrove* yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur, yang memiliki berbagai fungsi dan manfaat serta berperan penting dalam kehidupan manusia, baik secara ekologi, sosial, maupun ekonomi.

Desa Bokor merupakan desa yang berada di tengah Pulau Rangsang, yaitu terletak di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Desa Bokor memiliki luas 4314 Ha/43,14 Km² dengan batas wilayah dengan desa lain, yaitu: Sebelah Utara dengan Desa Sendaure, Sebelah Selatan dengan Selat Air Hitam, Sebelah Barat dengan Desa Telaga Baru, dan Sebelah Timur dengan Desa Kayu Ara.

Desa Bokor memiliki potensi wisata, diketahui Tim Penilai Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tingkat Nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, mengatakan bahwa “Potensi wisata Desa Bokor cukup luar biasa, pengelolaannya sudah terarah, serta kerja sama dan komitmen antara Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor dan Pemerintah Desa Bokor juga

sangat kuat. Cuma perlu inovasi-inovasi baru yang bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Desa Bokor, salah satunya yaitu wisata *mangrove*”.

Wisata *mangrove* menjadi salah satu hal yang penting dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bokor, karena banyak dari masyarakat Desa Bokor ingin desanya maju dan berkembang dan dikenal oleh masyarakat luar, serta meningkatkan perekonomian desa dengan adanya wisata *mangrove* ini. Untuk sekarang ini, Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor bekerja sama dengan aktor-aktor kemitraan yang berperan dalam mengembangkan wisata *mangrove* di Desa Bokor, tetapi masih ada kendala dalam peresmian wisata *mangrove* Desa Bokor, sehingga waktu peresmiannya diundur sampai waktu yang ditentukan.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternatif dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Seperti

halnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem *Mangrove* (SNPEM), pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa “SNPEM bertujuan untuk mensinergikan kebijakan dan program pengelolaan ekosistem mangrove yang meliputi bidang ekologi, sosial, ekonomi, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin fungsi dan manfaat ekosistem *mangrove* secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat”.

Desa Bokor berada di daerah kepulauan dan di wilayah pesisir yang menjadi faktor penunjang dalam meningkatkan perekonomian nasional, karena dipengaruhi oleh sistem lingkungan dan sumber daya alam yang mampu menunjang perekonomian desa yang dilakukan dengan cara pengelolaan sumber daya pesisir secara terpadu yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan dasar hukum yang tertera di UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam

pasal 1 ayat (31) UU No. 1 Tahun 2014, bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat tersebut perlunya upaya untuk memberikan fasilitas terbaik, dorongan dan juga bantuan kepada setiap insan masyarakat pesisir agar mampu menjalankan pilihan sendiri dengan baik dan tetap memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil secara lestari. Hal ini sangat penting bagi masyarakat Desa Bokor untuk menuju kemandirian yang lebih baik.

Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu *Multi-Stakeholder Partnerships* (Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan), kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Freeman et al. (1984, dalam jurnal Xue et al., 2020), yang mengidentifikasi pemangku kepentingan sebagai "setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi". Oleh karena itu, pemangku kepentingan tidak hanya mencakup investor tetapi juga kelompok lain yang terkait dengan hasil. Dilihat pengertian diatas, Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor merupakan organisasi kelompok yang

berperan penting dalam pengembangan wisata *mangrove* di Desa Bokor.

Kemudian, Kemitraan adalah adanya kebersamaan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menentukan arah, rencana dan melaksanakan pembangunan daerah (Asianto, 2009 dalam jurnal Samadara et al., 2016). Kemitraan merupakan suatu rencana yang dilakukan oleh dua pihak dengan tujuan tertentu dalam meraih keuntungan bersama yang saling membutuhkan dan membesarkan. Selanjutnya, ada kesepakatan atau kesepahaman di antara kedua belah pihak atau sekelompok pihak jika bermitra sekumpulan lembaga. Selanjutnya, tentunya saling ada kepercayaan dan saling membutuhkan. Dilihat dari pengertian ini, Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor menjalin kerja sama dengan aktor-aktor kemitraan dalam mengembangkan wisata *mangrove* di Desa Bokor.

Kemudian, Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri

sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya dan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) (Ismail et al., 2016). Dapat dilihat dari pengertian ini, Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor memberdayakan masyarakat Desa Bokor dengan masyarakat ikut berpartisipasi untuk mengembangkan wisata *Mangrove* di Desa Bokor.

Dari permasalahan diatas, perlunya suatu rencana untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa Bokor dalam mengembangkan wisata mangrove dari kerja sama dengan aktor-aktor kemitraan diantaranya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti, Stakeholders/perusahaan swasta (masih dalam tahap perundingan), dukungan penuh dari Dinas Pariwisata

Provinsi Riau, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

Didapatkan suatu rumusan masalah yang akan menjawab semua permasalahan yang terjadi di Desa Bokor, yaitu “Bagaimana Kemitraan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Mangrove di Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti?”. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang kemitraan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata mangrove di Desa Bokor, serta upaya untuk membantu hubungan kemitraan bisa berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengumpulan data dengan menggunakan metode yang bersifat alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam menjawab masalah yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi. Pada penelitian ini, data primer ini berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Bokor dan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bathin Galang Desa Bokor.

Kemudian, data sekunder merupakan struktur data yang bersifat menyangkut hubungan yang dituju dengan variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal, Peraturan Pemerintah dan Undang-undang terkait tentang kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wisata *mangrove*, serta melakukan pengamatan (observasi) ke lapangan dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bokor adalah desa yang berada di tengah Pulau Rangsang, yaitu lokasinya di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Desa ini berada di tepi Sungai Bokor yang mengalir dari tengah Pulau Rangsang menuju Selat Hitam. Jarak tempuh perjalanan dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu Selat Panjang ke Desa Bokor ditempuh sekitar 40 menit dengan menggunakan Kapal Pompong (sejenis kapal nelayan bermotor dengan kapasitas 30-an penumpang). Jumlah penduduk Desa Bokor yaitu sebanyak 3405 jiwa, yang terdiri dari laki-laki yaitu sebanyak 1703 orang dan perempuan yaitu sebanyak 1702 orang.

Desa Bokor memiliki sebuah kelompok yang berperan penting dalam meningkatkan destinasi wisata di Desa Bokor yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bathin Galang Desa Bokor. Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor adalah bentuk lembaga informal yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan

kepariwisataan di Desa Bokor, yang juga merupakan unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dan peran penting untuk mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata, salah satunya yaitu wisata *mangrove*.

Keberadaan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor dalam konteks pengembangan adalah sebagai pelaku penggerak dalam mendukung terciptanya lingkungan dan suasana kondusif di tingkat lokal yaitu di Desa Bokor. Peran dan kontribusi Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor ini perlu dimaksimalkan untuk didukung dan dikembangkan dengan baik agar turut menopang perkembangan dan peningkatan peran masyarakat Desa Bokor dalam mengembangkan destinasi wisata di Desa Bokor, salah satunya yaitu wisata *mangrove*.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, bahwa kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan dari pengunjung diantaranya kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual dengan

berekreasi dan meningkatkan pendapatan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dibentuknya Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor yaitu sebagai berikut:

- Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai pelaku yang sangat penting dalam dalam mewujudkan pembangunan pariwisata, serta dapat bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas pariwisata di Desa Bokor.
- Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif kepada masyarakat sebagai tuan rumah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
- Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi wisata yang ada di Desa Bokor.

Sedangkan, fungsi dari Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor yaitu sebagai berikut:

- Sebagai pelaku utama penggerak Sadar Wisata di lingkungan

wilayah Desa Bokor pada destinasi wisata Desa Bokor.

- Sebagai Mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam upaya untuk mewujudkan dan mengembangkan Sadar Wisata di Desa Bokor.

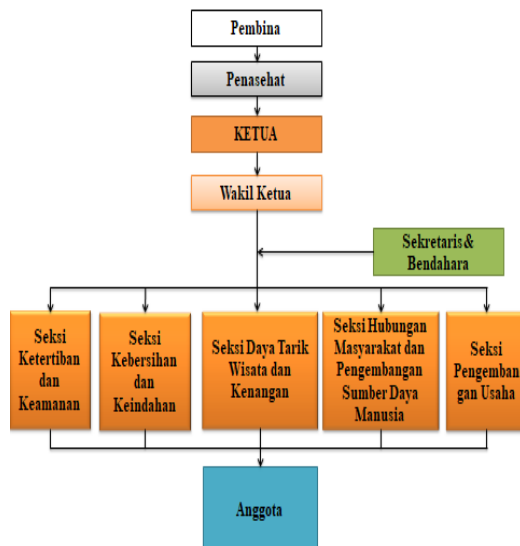
Dapat dilihat bahwa maksud tujuan dibentuknya dan fungsi dari Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor ini merupakan cara memberdayakan masyarakat melalui pengembangan wisata *mangrove* di Desa Bokor yang menjadi acuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bokor. Dalam mendapatkan data yang lebih jelas dan akurat mengenai peran aktor-aktor kemitraan dalam pengembangan wisata *mangrove* Desa Bokor, Peneliti telah mewawancarai informan-informan yang andil dalam pengembangan wisata *mangrove* Desa Bokor, yaitu Iriyanto Abdullah yang menjabat sebagai Kepala Desa Bokor, serta Sopandi menjabat sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bathin Galang Desa Bokor.

Dalam menjalankan program Sadar Wisata, Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor telah resmi

dikukuhkan oleh Pj. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti bertepatan pada 23 Februari 2017 dengan terteranya Surat Keputusan (SK) Tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata “Bathin Galang” Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti Periode Tahun 2018-2021.

Hubungan dan koordinasi kepengurusan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor dilaksanakan secara baik dan sungguh-sungguh dalam struktur organisasi yang teratur, hingga tiap pihak dapat mengetahui jabatan tugas dan wewenang dengan baik. Berikut adalah susunan organisasi Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor yang dapat tertera di Gambar 1:

Gambar 1.
Susunan Organisasi Pokdarwis Bathin
Galang Desa Bokor



Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Bokor dan Ketua Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor.

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa pembina dari Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Dinas Pariwisata Provinsi Riau dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian, penasehatnya adalah Pemerintah Desa Bokor (Kepala Desa Bokor dan Ketua BPD Bokor), untuk ketuanya yaitu Sopandi yang ditemani oleh wakil ketua, sekretaris dan bendahara, serta

seksi-seksi yang membantu diantaranya yaitu seksi Ketertiban dan Keamanan, seksi Kebersihan dan Keindahan, seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan, seksi Hubungan Masyarakat (Humas) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), seksi Pengembangan Usaha, serta seluruh anggota yang berjumlah 45 orang.

Mangrove merupakan salah satu sumber daya pesisir yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, ekologis dan fisik. Peran utama masyarakat pesisir dalam pengelolaan tanaman *mangrove* sangat menentukan keberhasilan kelestarian wilayah *mangrove*. Ditegaskan pula bahwa masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan baik secara lokal, regional maupun nasional akan lebih mendorong terciptanya wilayah tanaman *mangrove* (Wahyurini, 2017).

Seperti halnya yang ada di Desa Bokor, hutan *mangrove* sampai saat ini masih dalam keadaan baik yang selalu dipantau dan dijaga oleh Pemerintah Desa Bokor dan juga masyarakat Desa Bokor itu sendiri, sebagai kewajiban untuk tetap

memelihara dan mempertahankan ekosistem *mangrove* dari kerusakan seperti penebangan liar terhadap hutan *mangrove* dan membuang sampah di sungai sekitaran *mangrove*. Hutan *mangrove* ini sangat penting bagi Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor, karena sangat berpotensi dalam melaksanakan inovasi-inovasi yang dituangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bokor.

Masyarakat Desa Bokor biasanya melakukan kegiatan pemanfaatan pada kawasan hutan *mangrove* sebagai penangkapan ikan. Alasan masyarakat melakukan kegiatan ini adalah untuk kepentingan komersial, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan juga untuk kegiatan wisata. Kondisi sementara di kawasan wisata *mangrove* Desa Bokor masih bergelimang dengan semak-semak karena belum ada aksi bersih atau gotong royong di kawasan wisata *mangrove* yang tertera pada Gambar 2:

Gambar 2.
Kondisi Hutan *Mangrove* Desa Bokor



Sumber: diolah dari dokumentasi di kawasan wisata mangrove Desa Bokor.

Luas hutan *mangrove* di desa bokor seluruhnya adalah 390 hektar dengan komposisi 12 jenis tanaman dari 10 famili (bakau putih, bakau hitam, api-api, nyireh, pidada, dungun, cingam, kedabu, sesop, bebetak, pi ai dan nipah) dan kerapatan pohon yang sangat baik atau sangat padat.

Dari data yang telah didapatkan, Sopandi, Ketua Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor mengatakan bahwa, “Luas hutan *mangrove* di kawasan wisata *mangrove* hanya 10 hektar, sedangkan manfaat hutan *mangrove* adalah sebagai menjaga kelestarian

lingkungan, sebagai sumber ekonomi masyarakat dan juga sebagai daya tarik wisata yang berpotensi untuk dikembangkan, karena hutan *mangrove* mempunyai keistimewaan yang bisa menghidupkan masyarakat setempat. Pengembangan potensi hutan *mangrove* sejak dari dulu sudah dikembangkan oleh beberapa daerah, seperti Bali, Lagoy, Lombok dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, hal inilah menjadi inspirasi agar hutan *mangrove* mampu menjadi daya tarik tersendiri di Desa Wisata Budaya Bokor”. Dalam prakteknya pengembangan wisata hutan *mangrove* harus tetap dikelola dengan menghindari resiko dan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti dengan memperhatikan aspek kesesuaian serta daya dukung lingkungannya (Ramadani & Ilman Navia, 2019).

a) Kemitraan Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata *Mangrove*

Pemerintah Desa Bokor dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bathin Galang Desa Bokor mengembangkan suatu inovasi yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan membuat destinasi

wisata, yaitu wisata *mangrove*. Wisata *mangrove* merupakan suatu potensi alam yang layak dikembangkan karena sangat mendukung dan mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Desa Bokor. Ini merupakan salah satu pemberdayaan terhadap masyarakat, karena menjamin hak setiap masyarakat di Desa Bokor ini.

Dalam melaksanakan pengembangan wisata *mangrove*, Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor berada dalam naungan dari Pemerintah Desa Bokor yang berperan sebagai Penanggung jawab atau penasehatnya yaitu Kepala Desa Bokor dan Ketua BPD Bokor. Dalam menjalin sebuah kemitraan atau kerja sama, Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor sedang menjajaki/masih dalam tahap perundingan kepada para *stakeholders* atau para pemangku kepentingan yaitu perusahaan-perusahaan swasta di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menjalin kerja sama dalam mengembangkan wisata *mangrove* di Desa Bokor.

Kemitraan mengandung makna sebagai tanggung jawab moral perusahaan menengah atau besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya dalam bentuk kerjasama yang dilakukan untuk lebih memberdayakan usaha

kecil agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama (Yulianti, 2018). Pola kemitraan merupakan kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan swasta dengan pihak lain, seperti halnya Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor yang dipercaya untuk melakukan program kemitraan dalam menjalankan keinginan bersama dalam mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama.

Berikut adalah nama-nama aktor kemitraan dan perannya, diantaranya yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Desa Bokor yang berperan sebagai Pembina dan juga Penasehat yang berfungsi menunjuk arahan kepada pihak swasta dan masyarakat Desa Bokor serta Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor dalam meningkatkan pengembangan wisata *mangrove* di Desa Bokor. Kemudian, *Stakeholders*/pihak swasta berperan sebagai aktor yang berkontribusi langsung ke lapangan atau

keikutsertaan dalam meningkatkan pengembangan wisata *mangrove* di Desa Bokor. Sedangkan, masyarakat Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor berperan sebagai aktor yang terlibat langsung di Desa Bokor untuk mencapai tujuan dan bertanggung jawab dalam meningkatkan pengembangan wisata *mangrove* di Desa Bokor.

Masyarakat Desa Bokor sangat antusias dan mendukung penuh Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor dalam melaksanakan destinasi wisata, yaitu wisata *mangrove* terkhusus dengan pengembangannya. Hal ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat Desa Bokor kedepannya terhadap perkembangan ekologi, ekonomi dan sosial yang menjadi peran penting dalam memberdayakan masyarakat Desa Bokor.

Dengan adanya dukungan dari masyarakat, Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor berharap bantuan atau partisipasi masyarakat dalam mengembangkan wisata *mangrove* bersama-sama, seperti menjaga ekosistem hutan *mangrove* dari

penebangan liar terhadap *mangrove* dan membuang sampah di sungai di sekitaran *mangrove*, atau lebih tepatnya menjaga kelestarian alam.

Permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan SDM dilaksanakan pelatihan yang berbentuk pemberian materi terkait partisipasi masyarakat, konsep pemberdayaan masyarakat dan pentingnya pengelolaan sumber daya alam melalui keterlibatan masyarakat (Fitrawahyudi et al., 2019). Hal ini sangat penting untuk diketahui, supaya tidak terjadinya abrasi di *mangrove* itu sendiri sehingga menjadi salah satu kerusakan alam yang sangat dirugikan.

Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor melaksanakan karcis masuk atau memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat Desa Bokor yang bersedia menjadi anggota Pokdarwis melalui Peraturan Kepala Desa Bokor sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan pengembangan destinasi wisata budaya Desa Bokor, khususnya pengembangan wisata *mangrove*. Dalam menjalankan pengembangan wisata *mangrove*, Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang

Desa Bokor telah membangun jogging trek atau lintasan untuk berjalan ke-dalam hutan *mangrove* yang dibuat menggunakan kayu meranti sepanjang 360 meter dan membelah rimbunnya pepohonan menuju menara pandang.

Joging trek berguna bagi para pengunjung atau wisatawan untuk melihat keindahan *mangrove* dari dalam hutan. Sedangkan, menara pandang yang tingginya 9 meter berguna bagi para pengunjung atau wisatawan untuk melihat hamparan luas hutan *mangrove* dari atas yang makin menghijaukan mata. Joging trek dan menara pandang dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI pada tahun 2019. Berikut adalah jogging trek dan menara pandang yang tertera pada Gambar 3:

Gambar 3.
Joging Trek dan Menara Pandang di
Kawasan Wisata Mangrove



*Sumber: diolah dari dokumentasi di
kawasan wisata mangrove
Desa Bokor.*

Selain joging trek dan menara pandang, Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor juga membangun tujuh pendopo untuk para pengunjung beristirahat sejenak di kawasan wisata *mangrove*, membangun tempat untuk ibadah khususnya umat islam

untuk melaksanakan ibadah Shalat, membangun tempat yang dijadikan sebagai warung di kawasan wisata *mangrove*, serta toilet turut disediakan yang tertera pada Gambar 4:

Gambar 4.
Pendopo, Tempat untuk Ibadah dan
Tempat yang dijadikan sebagai
Warung di Kawasan Wisata Mangrove
Desa Bokor





Sumber: diolah dari dokumentasi di kawasan wisata mangrove Desa Bokor.

Dalam melaksanakan pengembangan wisata *mangrove* ini, masih ada kekurangan yang terdapat di kawasan wisata *mangrove* yaitu infrastruktur jalan mengalami kerusakan di kawasan wisata *mangrove* dikarenakan adanya keluar masuk sepeda motor yang melangsir memakai gerobak dengan membawa muatan yang berat seperti batu, pasir, semen dan kayu ketika membangun jogging trek dan menara pandang. Kemudian, kekurangan berikutnya adalah belum adanya pelatihan pemandu wisata bagi masyarakat Desa Bokor, khususnya bagi anggota

Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor yang bertujuan untuk memberi pemahaman yang jelas tentang wisata *mangrove* Desa Bokor kepada setiap wisatawan/pengunjung. Berikut adalah kondisi infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan yang tertera pada Gambar 5:

Gambar 5.
Kondisi Infrastruktur Jalan di Kawasan Wisata Mangrove Desa Bokor





*Sumber: diolah dari dokumentasi di
kawasan wisata mangrove.*

Kemitraan yang terjalin dalam meningkatkan pengembangan wisata *mangrove* di Desa Bokor mengalami masalah, yaitu kemitraannya tidak berkelanjutan. Hal ini dikarenakan, Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor masih menjajaki atau masih dalam tahap perundingan kepada *stakeholders*/perusahaan-perusahaan swasta di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk berkontribusi dalam meningkatkan pengembangan wisata *mangrove*.

Kemitraan yang tidak berkelanjutan ini berakibat bagi pengembangan wisata *mangrove* yang tidak berjalan dengan semestinya, kurangnya dukungan langsung oleh pihak swasta, serta

tidak adanya perubahan/peningkatan berarti dalam pengembangan wisata *mangrove* Desa Bokor. Selain itu, dengan kemitraan tidak berkelanjutan ini berdampak pada saat ini yang dimana kondisi sementara di kawasan wisata *mangrove* Desa Bokor masih bergelimang dengan semak-semak karena belum ada aksi bersih atau gotong royong di kawasan wisata *mangrove*, serta kekurangan-kekurangan yang telah dijelaskan diatas.

Kondisi seperti ini membuat Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor mengalami kesulitan dalam meningkatkan pengembangan wisata *mangrove* dengan kemitraan tidak berkelanjutan ini menjadi masalah karena tujuan dalam meningkatkan pengembangan wisata *mangrove* Desa Bokor melalui kerjasama terhadap pihak swasta/perusahaan-perusahaan swasta hingga sekarang belum ada hasil keputusan akhirnya dalam mengetahui pihak-pihak yang ikut berkontribusi, sehingga memakan waktu lama menunggu kepastian dari pihak swasta untuk memberi kepastian.

Wisata *mangrove* Desa Bokor ini telah dibangun sejak 2018 dan hingga sekarang masih belum diresmikan, hal ini akan berdampak pada kurangnya perhatian khusus terhadap menjaga kawasan wisata *mangrove*. Kemitraan tidak berkelanjutan ini membuat Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor melakukan suatu rancangan yang bisa menarik simpati para pihak swasta dengan mengadakan *event-event* yang besar dan berkaitan langsung dengan wisata *mangrove*.

Kemitraan yang berkelanjutan sangat berpotensi karena perjalinan kerjasama ini akan menguntungkan bagi Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor serta pihak swasta yang berkontribusi dalam mencapai tujuan yang sama.

b) Hal dalam Mencapai Kesuksesan Menuju Desa Wisata (Handayani & Wijayanti, 2017)

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Desa Bokor telah memiliki

sebuah organisasi atau kelompok yang berperan aktif untuk meningkatkan destinasi wisata, salah satunya wisata *mangrove* yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bathin Galang Desa Bokor. Terbentuknya Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor merupakan hal yang sangat penting bagi Pemerintah Desa Bokor, terkhusus masyarakat Desa Bokor karena keberadaan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor adalah sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya untuk bersama-sama peduli wisata dan ingin mengembangkan wisatanya dengan menciptakan suasana lingkungan yang bersih dan nyaman serta kondusif di tingkat lokal yaitu di Desa Bokor itu sendiri.

Peran dan kontribusi Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor ini perlu terus didukung dan dikembangkan dengan baik agar turut menopang perkembangan dan peningkatan peran masyarakat Desa Bokor dalam mengembangkan destinasi wisata di Desa Bokor, salah satunya yaitu wisata *mangrove*. hal ini merupakan cara memberdayakan masyarakat Desa Bokor yang

berpotensi menjadi acuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bokor itu sendiri.

2. Kemitraan

Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor telah bekerja sama dengan para aktor-aktor kemitraan, diantaranya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Dinas Pariwisata Provinsi Riau dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti, *stakeholders*/perusahaan swasta (masih dalam tahap perundingan), serta masyarakat Desa Bokor. Aktor-aktor kemitraan ini telah memiliki perannya masing-masing dalam meningkatkan pengembangan wisata *mangrove* di Desa Bokor.

Adanya aktor-aktor kemitraan ini berpotensi besar bagi pengembangan wisata *mangrove* Desa Bokor, karena segala tujuan dan kegiatan yang akan dicapai bersama terasa menjadi mudah dan fleksibel. Tetapi, terjadi kendala dalam meningkatkan pengembangan wisata *mangrove* di Desa Bokor yaitu kemitraannya tidak

berkelanjutan yang dikarenakan belum adanya kepastian dari pihak swasta/*stakeholders* untuk berkontribusi dalam pengembangan wisata *mangrove* di Desa Bokor.

3. Promosi

Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor mempromosikan wisata *mangrove* Desa Bokor melalui media informasi yaitu melalui media internet dengan telah membangun jogging trek atau lintasan untuk berjalan ke dalam hutan *mangrove* yang berguna bagi para pengunjung atau wisatawan untuk melihat keindahan hutan *mangrove* dari dalam hutan, menara pandang yang berguna bagi para pengunjung atau wisatawan untuk melihat hamparan luas hutan *mangrove* dari atas, tujuh pendopo untuk para pengunjung beristirahat sejenak di kawasan wisata *mangrove*, tempat untuk ibadah khususnya umat islam untuk melaksanakan ibadah Shalat, tempat yang dijadikan sebagai warung di kawasan wisata *mangrove*, serta spot foto yang bermanfaat bagi pengunjung untuk berfoto-foto yang

berada di dalam kawasan wisata hutan *mangrove*.

Promosi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor untuk terus mengembangkan kawasan wisata *mangrove*, agar para wisatawan/pengunjung semakin banyak untuk berdatangan ke kawasan wisata *mangrove* Desa Bokor.

4. Festival

Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor menyelenggarakan festival besar yang berpengaruh untuk meningkatkan pengembangan wisata *mangrove*, yaitu acara Pesta Sungai Bokor. Desa Bokor sebelumnya sudah dinobatkan sebagai Desa Wisata Budaya Bokor pada tahun 2011 dengan mengadakan *Festival Bokor Riviera*, tahun 2012 mengadakan *Bokor Folklore Festival* dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya hingga sekarang festival tersebut masih menyelenggarakan dengan nama yaitu Pesta Sungai Bokor. Hal ini sebagai acuan untuk

memperkenalkan Desa Bokor baik dari dalam maupun luar negeri tentang wisatanya dan ingin mencapai maksimal daya tarik pengunjung/wisatawan asing maupun lokal untuk menghadiri Festival tersebut, karena kawasan wisata *mangrove* berdekatan dengan pergelaran Pesta Sungai Bokor tersebut, sehingga akan membuat keuntungan bagi Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor dalam meningkatkan pengembangan wisata *mangrove* Desa Bokor.

Festival Pesta Sungai Bokor ini selalu mengadakan pagelaran seni dan budaya, serta permainan rakyat yang diantaranya permainan Lari di Atas Tual Sagu yang sudah banyak dikenal oleh orang dalam negeri maupun luar negeri, festival ini berpengaruh juga bagi aktor-aktor kemitraan untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor untuk meningkatkan pengembangan wisata *mangrove* di Desa Bokor.

5. Kerja Sama dengan Pihak Swasta, Universitas, atau Stakeholder Terkait

Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor bekerja sama dengan pihak swasta/*stakeholder* di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan pengembangan wisata *mangrove*, tetapi kerja samanya belum terlaksana dikarenakan masih dalam tahap menjajaki atau masih dalam tahap perundingan, hal ini menjadi masalah karena hubungan kemitraannya tidak berkelanjutan.

Adanya kemitraan tidak berkelanjutan ini berpotensi buruk bahwa pengembangan wisata *mangrove* Desa Bokor tidak bisa dilaksanakan dengan baik tanpa adanya kepastian dari pihak swasta/*stakeholder* untuk berkontribusi dalam meningkatkan pengembangan wisata *mangrove* Desa Bokor. Untuk mencapai kemitraan yang berkelanjutan, Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Desa Bokor melaksanakan *event-event* besar yang berpengaruh bagi pengembangan wisata *mangrove* Desa Bokor agar

terkesan bagi pihak swasta/*stakeholder* untuk memberi kepastian dalam bekerja sama.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor bekerja sama dengan aktor-aktor kemitraan yang berperan dalam mengembangkan wisata *mangrove* di Desa Bokor yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti, *stakeholders*/perusahaan swasta (masih dalam tahap perundingan), dukungan penuh dari Dinas Pariwisata Provinsi Riau, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Kemitraan yang terjalin dalam meningkatkan pengembangan wisata *mangrove* di Desa Bokor mengalami masalah, yaitu kemitraannya tidak berkelanjutan, karena masih dalam tahap menjajaki atau masih dalam tahap perundingan kepada *stakeholders*/pihak swasta atau perusahaan-perusahaan swasta di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk berkontribusi dalam meningkatkan pengembangan wisata *mangrove*.

Kemitraan yang tidak berkelanjutan ini berakibat bagi pengembangan wisata *mangrove* yang tidak berjalan dengan semestinya, kurangnya dukungan langsung oleh pihak swasta, serta tidak adanya perubahan/peningkatan berarti dalam pengembangan wisata *mangrove* Desa Bokor. ada beberapa hal yang bisa dicapai untuk menuju desa wisata yang berkelanjutan, diantaranya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), kemitraan, promosi, festival dan kerja sama dengan pihak swasta/universitas/*stakeholder* terkait.

Penulis merekomendasikan beberapa hal yang dapat membantu Pemerintah Desa Bokor dan Pokdarwis Bathin Galang Desa Bokor untuk mempercepat proses hubungan kemitraan terhadap aktor-aktor kemitraan, yaitu harus mampu memberikan kepercayaan kepada para aktor kemitraan terhadap keuntungan potensi wisata *mangrove* kedepannya jika dikembangkan dan perlu mempercepat kerja sama dengan benar-benar berniat untuk meningkatkan pengembangan wisata

mangrove Desa Bokor, terutama kepada pihak swasta/*stakeholders* agar bisa memberikan kepastian dalam menjalankan hubungan kemitraan, hingga kemitraannya bisa berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfizar, F. (2016). Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dalam Meningkatkan Sarana Wisata Kota Masyarakat Kota Surabaya (Studi Kasus pada Wisata *Mangrove* Wonorejo). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(2), 393–406.
- Ekowanti, M. R. L. (2017). *Kemitraan dalam Otonomi Daerah*. Malang: Intelegensia Media.
- Erbabley, B. Z., & Furqon, M. (2019). Strategi Pengembangan Kawasan Wisata *Mangrove* Desa Tagalaya. *Seri Ilmu-Ilmu Alam Dan Kesehatan*, 3(2), 12–19.
- Fatih, A. Al. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. UNPAD Press.

- Fitrawahyudi, Nasrum, M., & Sofyan. (2019). Pengelolaan Wisata Mangrove Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Marannu. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 3(1), 68–77. <https://jurnalpertanianumpar.com/index.php/jdm/article/view/488>
- Ginting, S. (2019). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat di Belawan Kota Medan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, IV(1), 22–41.
- Handayani, T., & Wijayanti, D. (2017). Program Pengembangan Eko-Eduwisata Mangrove Menuju Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Daerah Edisi Khusus 2017 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*, 7, 22–36.
- Idham, A. (2015). *Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ismail, F., Nurhakim, S. A., & Rachim, H. A. (2016). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Tbk). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13639>
- Kinasih, P. I., & Purnaweni, H. (2019). Pemanfaatan Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia*, 01, 71–78.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

- Prihadi, D. J., Riyantini, I., & Ismail, M. R. (2018). Pengelolaan Kondisi Ekosistem *Mangrove* dan Daya Dukung Lingkungan Kawasan Wisata Bahari *Mangrove* di Karangsong Indramayu. *Jurnal Kelautan Nasional*, 1(1), 53–64.
- Purwaningrum, H. (2020). Pengembangan Ekowisata Hutan *Mangrove* Pantai Baros Desa Titihargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. *Journal of Tourism and Economic*, 3(1), 31–40.
- Rahim, F. (2012). *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Jakarta: Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Ramadani, R., & Ilman Navia, Z. (2019). Pengembangan Potensi Ekowisata Hutan *Mangrove* Di Desa Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Aceh. *Biologica Samudra*, 1(1), 41–55.
- Samadara, S., Tuati, N. F., & Sauw, H. M. (2016). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KEMITRAAN (Studi Kasus Nelayan Desa Sulamu Kabupaten Kupang NTT). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 136–156.
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1683>
- Sulaiman, M., Sulardiono, B., & Ain, C. (2019). Strategi Pengembangan Wisata Hutan *Mangrove* Berbasis Kegiatan Konservasi di Desa Kartika Jaya Kabupaten Kendal. *Journal of Maquares (Management of Aquatic Resources)*, 8(2), 46–55.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Wahyurini, E. T. (2017). PEMBERDAYAAN DAN PERAN MASYARAKAT PESISIR PADA PENGEMBANGAN MANGROVE MENUJU

EKOWISATA DI
KABUPATEN

PAMEKASAN. *Prosiding
Seminar Nasional & Temu
Ilmiah Jaringan Peneliti IAI
Darussalam Blokagung
Banyuwangi, ISBN: 978-602-
50015-0-5 Tani, 442–455.*

KESEJAHTERAAN. *Jurnal
Sosiologi, 20(1), 11–21.*

Xue, Y., Temeljotov-Salaj, A.,
Engebø, A., & Lohne, J.
(2020). Multi-sector
partnerships in the urban
development context: A
scoping review. *Journal of
Cleaner Production, 268,*
122291, 1–14.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepr.2020.122291>

Yulianti, D. (2018).
IMPLEMENTASI PROGRAM
KEMITRAAN DALAM
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR)
MELALUI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK
MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN